

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data sebagaimana fokus kajian dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bandung” diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Kebijakan Penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan dapat dirunut dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Satuan pendidikan mengetahui dan memahami dasar kebijakan penjaminan mutu tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan pada status kategori sekolah masing-masing. Adapun dasar kebijakan penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada sekolah kategori R-SBI disusun berdasarkan pada tuntutan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sehingga dalam proses penyusunan dasar kebijakan penjaminan mutu sudah sesuai dengan tuntutan teori dan perundang-undangan mengenai penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan, kemudian pada sekolah kategori mandiri dasar kebijakan penjaminan mutu mengacu pada tuntutan pemenuhan instrumen SKM itu

**Asep Rosidin, 2013**

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bandung” (Studi Kasus di SMAN 1 Baleendah, SMAN 1 Margahayu dan SMAN 1 Ciparay)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sendiri. Dan pada sekolah kategori standar dasar kebijakan mutu pada tingkat satuan pendidikan disusun berdasarkan pada tuntutan operasional sekolah untuk memenuhi penilaian akreditasi, namun demikian adanya komitmen untuk membangun budaya mutu (*Quality Culture*), sekolah kategori standar memiliki penjaminan mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

2. Struktur organisasi dan pembagian tugas pada masing-masing kategori sekolah disesuaikan dengan tuntutan status kategori sekolah masing-masing, Struktur organisasi pada R-SBI terdapat tim penjaminan mutu khusus yang berada di atas Wakil Kepala Sekolah secara langsung dan bertanggung jawab bersama-sama kepada Kepala Sekolah yang disebut dengan Penanggung Jawab Program R-SBI (PJB R-SBI) yang memiliki pembagian tugas yang jelas dalam proses penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan. Pada Sekolah Kategori Mandiri terdapat Wakil Kepala Sekolah Manajemen Mutu yang bertugas untuk berkolaborasi dengan setiap bidang dalam mengendalikan mutu pada setiap bidang dan dalam mengendalikan pengelolaan sekolah untuk memenuhi tuntutan sebagai sekolah kategori mandiri dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. Pada Sekolah kategori Standar adalah tidak menggambarkan secara langsung tim penjaminan mutu pada bagan struktur organisasinya, namun demikian dalam pelaksanaannya ada tim pengembangan sekolah (TPS) dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang secara khusus bertanggungjawab dalam pengembangan kurikulum pembelajaran dalam proses pemenuhan SNP untuk mempersiapkan penilaian akreditasi sekolah.

3. Proses penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan diimplementasikan secara berbeda-beda tergantung pada tuntutan kategori sekolah masing-masing namun, pada sekolah kategori standar melaksanakan penjaminan mutu melalui *Quality Culture* pada pengembangan potensi yang dimiliki yaitu pada bidang pengembangan kurikulum dengan membangun sistem pembelajaran melalui pendekatan *reward* yang memotivasi siswa dan guru untuk berprestasi, kemudian dalam bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan karir dengan sistem periodisasi. Pada SKM dengan mengendalikan mutu SKM itu sendiri yang dilakukan oleh Wakasek Manajemen Mutu, sehingga proses yang dilaksanakan adalah dengan membangun budaya mutu pada bidang-bidang tertentu khususnya dalam mengembangkan SKM-PBL-PSB. Pada R-SBI yang telah melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan kriteria proses penjaminan mutu sebagaimana tuntutan standar teori penjaminan mutu ataupun perundang-undangan yang mendasari penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan baik secara *by design* ataupun dalam *quality culture*, hal demikian karena adanya tuntutan pelaksanaan Manajemen Mutu pada R-SBI dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 sebagai salah satu syarat operasionalnya.
4. Dampak dari implementasi penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Bandung yang berbeda, sehingga masing-masing sekolah memiliki keunggulan tersendiri dalam bidang-bidang yang berbeda sebagai dampak dari proses penjaminan mutu yang berbeda-beda pula,

misalnya R-SBI memiliki keunggulan dalam bidang manajemen mutunya itu sendiri, kemudian Sekolah Kategori Mandiri dalam bidang penyelenggaraan akademik dan SKM-PBKL-PSB, sedangkan sekolah kategori standar memiliki keunggulan dalam membangun budaya mutu pada bidang sistem pembelajaran untuk mempersiapkan *olimpiade sains*, dalam pengembangan ekstrakurikuler dan pada pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem periodisasi. Budaya mutu pada R-SBI karena ada tuntutan dari implementasi manajemen mutu ISO 9001: 2008, pada SKM budaya mutu terlihat dalam proses pemenuhan SNP dan tuntutan SKM-PBL-PSB itu sendiri, sedangkan pada sekolah kategori standar terlihat ada upaya-upaya pada beberapa hal tertentu seperti dalam mutu pembelajaran dan manajemen kesiswaan. Prestasi akademik sekolah kategori standar dapat bersaing dengan sekolah kategori R-SBI dan SKM dan dalam beberapa bidang prestasi non-akademik yang justru lebih unggul sekolah kategori standar, dalam bidang akademik khususnya ujian sekolah SKM lebih unggul, namun karena penentuan standar capaian mutu masing-masing sekolah berbeda, setiap sekolah mengakui dapat mencapai sasarnya rata-rata 80%. Sedangkan mengenai kepuasan siswa dan orang tua siswa sebagai kastemer dari satuan pendidikan itu sendiri pada ketiga kategori sekolah yang menjadi subjek penelitian masih positif, selanjutnya mengenai pemanfaatan analisis capaian sebagai dasar kebijakan untuk perencanaan perbaikan mutu selanjutnya pada ketiga kategori sekolah pada dasarnya menyatakan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi Sekolah yang dijadikan tempat penelitian (SMA Negeri 1 Baleendah, SMA Negeri 1 Margahayu dan SMA Negeri 1 Ciparay), Tim Penjaminan Mutu pada tingkat satuan pendidikan, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan terkait, penelitian selanjutnya, serta pihak lain yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Bagi Satuan Pendidikan

- a. Upaya-upaya meningkatkan mutu pada tingkat satuan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah kategori standar pada hal-hal tertentu dalam penelitian ini terbukti dapat meningkatkan capaian mutu secara optimal, dengan demikian penulis menyarankan upaya-upaya untuk merencanakan penjaminan mutu secara sistematis dan bertahap (*By desain* dari mulai analisis kebijakan, proses dan pemanfaatan hasil capaian mutu sebelumnya) dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini digunakan oleh satuan pendidikan kategori standar tersebut dan tidak harus selalu berstandar internasional.
- b. Selanjutnya budaya mutu (*Quality Culture*) yang dilaksanakan pada sekolah kategori mandiri dengan keunggulannya sebagai sekolah model sudah terbukti dapat meningkatkan capaian mutu sebagaimana dalam penelitian ini dibandingkan dengan kategori sekolah lainnya, namun demikian penulis menyarankan untuk dapat melaksanakan penjaminan mutu secara komprehensif dalam perspektif sistem agar lebih memudahkan sekolah

kategori mandiri dalam memetakan perbaikan mutu secara berkelanjutan, namun tidak harus menggunakan prosedur yang berstandar internasional.

- c. Selanjutnya pada sekolah kategori R-SBI dengan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 telah melaksanakan tahapan-tahapan penjaminan mutu sesuai dengan tuntutan sistem manajemen mutu tersebut dan telah mencapai target mutu secara rasional, namun demikian dalam penelitian ini penulis melihat adanya peluang-peluang pada sekolah kategori R-SBI seharusnya dapat meningkatkan capaian mutunya lebih baik lagi dan tidak terlalu disibukan dengan adanya tuntutan administratif dari sistem manajemen mutu itu sendiri sehingga keluar dari esensi penjaminan mutu itu sendiri.

## **2. Bagi Tim Penjaminan Mutu**

Sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 91: (1) bahwa Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, dengan demikian penulis memberikan saran agar tim penjaminan mutu melaksanakan penjaminan mutu dengan perencanaan secara sistematis (*By Desain*) dan membangun budaya mutu (*Quality Culture*) sebagai tugas profesional dan proporsional dalam tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.

## **3. Bagi Dinas Pendidikan/Pemerintah**

- a. Sebagaimana hasil dalam penelitian ini bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan mutu yang dilakukan masih tergantung pada tuntutan kategori sekolah masing-masing, sehingga harus ada upaya yang terintegrasi dari pemerintah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan agar meningkatkan kinerja pada masing-masing tugas, tanggung jawab dan wewenang lembaga terkait.

- b. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah adanya pemerataan fungsi supervisi lembaga penjaminan mutu pada sekolah kategori standar dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dapat memetakan perbaikan mutu di atas SNP dan membangun budaya mutu (*Quality Culture*).

Perlu adanya pedoman penjaminan mutu secara terencana dan sistematis untuk tingkat satuan pendidikan sebagai pedoman satuan pendidikan dalam memetakan potensi internalnya untuk dapat meningkatkan target capaian mutu pendidikan yang berkelanjutan.